

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS
PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH
LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim



Oleh :

DISWO RISMI
NPM. 0771010075

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
S U R A B A Y A
2012

i

Nama : Diswo Rismi
NPM : 0771010075
Jurusan : Ilmu Hukum/Pidana
Judul Skripsi :

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN
AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI
GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

BAB III

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR

SUNGAI BRANTAS OLEH PABRIK

KERTAS PT. X DI GRESIK

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENYELESAIN SENGKETA NON LITIGASI ATAS
PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH
LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

Disusun Oleh :

DISWO RISMI
NPM. 0771010075

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

SUBANI, SH., M.Si
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

YANA INDAWATI, SH., M.Kn
NIP/NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

D E K A N

HARYO SULISTIYANTORO, SH., M.M
NIP/NPT. 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

Disusun Oleh :

DISWO RISMI
NPM. 0771010075

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tim Penguji :

1. HARYO SULISTIYANTORO, SH., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001 (.....)
2. H. SUTRISNO, SH., M.Hum
NIP. 1960212 198803 1 001 (.....)
3. SUBANI, SH., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001 (.....)

Mengetahui,

D E K A N

HARYO SULISTIYANTORO, SH., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS
PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH
LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

Oleh :

DISWO RISMI
NPM. 0771010075

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
Pada Tanggal 15 Mei 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

SUBANI, SH., M.Si
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

HARYO SULISTIYANTORO SH., M.M
NIP/NPT. 19620625 199103 1 001

Pembimbing Pendamping 2.

YANA INDAWATI, SH., M.Kn
NIP/NPT. 3 7901 07 0224

H. SUTRISNO, SH., M.HUM
NIP/NPT. 19601212 198803 1 001

3.

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn
NIP/NPT. 37 507 07 0225

Mengetahui,
D E K A N

HARYO SULISTIYANTORO, SH., M.M
NIP/NPT. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK”.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistianoro, SH., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, M.S., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Ketua Program Studi sekaligus sebagai dosen Pembimbing I serta bapak Fauzul Aliwarman, SH., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam pembuatan Skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak Kholik selaku Supervisor Pabrik dan juga warga setempat yang terus memberikan perhatian dalam keperluan Skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Sariyanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua Orangtua dan juga seluruh keluarga besarku yang memberikan dukungan dari segi apapun demi kelancaran Skripsi sampai selesai.
10. Kekasihku, Adit yang selalu siap bertukar pikiran serta selalu mampu menenangkan dikala butuh jawaban serta keluarga besar kekasihku yang terus memberikan support dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.
11. Sahabat-sahabatku, Andina, Joko, Irwansyah, Firdaus, Irwansyah, Illya, Brilian, Danu serta seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan saran maupun masukan didalam penyusunan Skripsi.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN REVISI.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR LAMPIRAN.....xi

ABSTRAKSI.....xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....6

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Manfaat Penelitian.....7

1.5 Kajian Pustaka.....8

1.6 Metodologi Penelitian.....23

1.7 Sistematika Penulisan.....25

BAB II PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN

AIR SUNGAI BRANTAS OLEH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

2.1 Gambaran Kasus Pencemaran Air Sungai Brantas oleh Pabrik Kertas PT. X
di Gresik.....28

2.2 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atas Pencemaran Air Sungai Brantas oleh Limbah Pabrik Kertas PT. X di Gresik.....	30
2.3 Analisa atas Penyelesaian Sengketa non litigasi atas Kasus Pencemaran Air Sungai Brantas di Gresik dengan UUPPLH dan AMDAL.....	32
BAB III HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH PABRIK KERTAS PT. X GRESIK	
3.1 Hambatan Secara internal penyelesaian Sengketa Pencemaran Air oleh PT. X.....	42
3.2 Hambatan Secara Eksternal Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air oleh PT. X.....	43
3.3 Analisa Faktor yang menjadi Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa non Litigasi dalam kasus Pencemaran Air.....	45
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran gambar pabrik Kertas PT. X di Gresik
2. Lampiran gambar lokasi pembuangan limbah netral ke Sungai
3. Lampiran gambar limbah pabrik yang mencemari lingkungan
4. Lampiran wawancara terhadap warga setempat pabrik Kertas PT. X di Gresik
5. Lampiran baku mutu air
6. Lampiran resume kata baku
7. Lampiran jurnal ilmiah mengenai penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan
8. Lampiran kartu bimbingan skripsi
9. Lampiran hasil kesepakatan mediasi
10. Lampiran PP No. 27 Th. 1999
11. Lampiran UU No. 23 Th. 1997
12. Lampiran UU No. 32 Th. 2009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diswo Rismi
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 22 Desember 1988
NPM : 0771010075
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Sidotompo III/1, Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR
SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK”
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah
benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai ketentuan yang
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Surabaya, 8 Mei 2012
Penulis

SUBANI, SH., M.Si
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

DISWO RISMI
NPM. 0771010075

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Diswo Rismi
NPM : 0771010075
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 22 Desember 1988
Program Studi : Strata 1 (S 1)
Judul Skripsi :

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR
SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) serta hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa atas pencemaran air Sungai Cabang Kali Brantas yang ditimbulkan oleh limbah pabrik Kertas PT. X di Gresik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis melalui wawancara. Sumber data diperoleh dari hasil-hasil penelitian, perilaku faktual dari masyarakat, jurnal ilmiah lingkungan hidup dan juga Undang-undang Lingkungan Hidup. Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif yang hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pencemaran air Sungai Brantas yang ditimbulkan oleh pabrik Kertas PT. X baru terdeteksi sejak tahun 2005-2008, dan penyelesaian sengketa lingkungan yang dipilih adalah melalui mediasi yaitu luar pengadilan (non litigasi) dengan seorang mediator diluar sangkut pautnya dengan PT. X dan warga Wringin Anom, dimana dalam proses mediasi tersebut mengalami hambatan secara eksternal dan internal dan hambatan yang paling dominan adalah secara eksternal yaitu faktor dari bapak Lurah daerah Wringin Anom itu sendiri. Akhirnya pada tahun 2008 sengketa tersebut selesai dan hasil mediasi telah dapat disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana PT. X harus membayar ganti rugi Rp 8.500.000,00 dan juga denda berupa pemberian barang-barang/limbah pabrik kepada warga Wringin Anom.

Kata kunci : Pencemaran Lingkungan (air sungai Brantas), Penyelesaian sengketa, hambatan dalam penyelesaian sengketa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu kehidupan sangat diharapkan adanya suatu perusahaan. Karena perusahaan ibarat paru-paru di dalam kehidupan, dimana saat manusia sulit bernafas akan tertolong dengan adanya perusahaan yang berperan sebagai paru-paru tersebut. Disini bermakna bahwa perusahaan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang.

Namun seiring berjalannya waktu, melihat perkembangan zaman yang semakin maju, yang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah menggunakan baik sistem, peralatan maupun peraturannya lebih kedepan lebih canggih dan modern. Dan secara otomatis hal ini akan memberikan banyak dampak dan kendala terhadap lingkungan hidup sekitar, dari tingkatan paling rendah sampai kendala yang paling berat.

Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya perubahan lingkungan, lingkungan tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Selanjutnya manusia itu sendiri secara berkelanjutan terus memikirkan upaya bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, diantaranya dengan menerapkan hukum lingkungan.

Sungguh memprihatinkan melihat adanya Pabrik Kertas di Gresik yang memberikan dampak negatif karena tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Dimana perusahaan tersebut secara sembarangan membuang limbah kertasnya kesungai yang menyebabkan pencemaran air. Hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, baik warga setempat, lingkungan setempat maupun warga dan lingkungan sekitar yang dilewati aliran sungai. Terutama yang ikut memanfaatkan air sungai, misal untuk pengairan sawah, kebun dan lingkungan, untuk memelihara ternak, serta terutama bagi ikan, hewan-hewan dan kehidupan sehat air sungai.

Hal ini secara otomatis dapat menimbulkan ketegangan dan kekesalan para warga dan pihak-pihak lain. Sebab walaupun perusahaan tersebut sudah memiliki ijin mendirikan suatu perusahaan terhadap kertas, tetapi dengan adanya pencemaran air disungai dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Terbukti tahun 2005-2008 terjadi sengketa perusahaan dengan warga. Dimana Warga menggugat perusahaan atas pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan kertas tersebut. Warga menuntut Lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta agar memperoleh jaminan kepastian hukum dan

perlindungan hak setiap orang untuk memperoleh Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab pada waktu itu adalah puncak kekesalan warga terhadap dampak-dampak negatif yang diberikan oleh perusahaan terhadap warga dan lingkungan. Dimana aktivitas warga dari air sungai macet karena limbah perusahaan yang bau dan berbahaya tersebut telah meracuni air sungai, terbukti dengan adanya dua anak yang sakit akibat mandi dsungai serta adanya ikan-ikan yang mati yang mengapung dpermukaan air.

Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu perusahaan kertas tersebut tetap tidak mengeluarkan tindakan apapun yang diharapkan warga. Karena Perusahaan tersebut merasa telah berjasa karena banyak warga sekitar yang menjadikan perusahaan tersebut sebagai paru-paru kehidupan keluarga mereka. Dan hal inilah yang menyebabkan bersitegangan antara perusahaan dan warga dari tahun 2005-2008.

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan peluang yang lebih jelas untuk melakukan penegakan hukum bagi seseorang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk itu perlu penegakan supermasi hukum yang tegas, adil dan bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan kualitas hidup itu sendiri.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri

ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan limbah industri modern yang baik pada akhirnya akan dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir resiko dampak besar dari pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Perkembangan pembangunan menuntut pertumbuhan secara ekuivalen dengan perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya, diantaranya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena limbah industri. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹

Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pembangunan seperti aktivitas

¹ P.Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005, Hal. 3

industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung lingkungan, sehingga dampak buruk yang sekiranya muncul dapat diperkirakan, diantisipasi, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalaui pikiran yang kritis ataupun berdasarkan pengalaman. Usaha inipun belum merupakan kegiatan ilmiah yang seutuhnya, oleh karena itu tidak jarang mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu, serta juga tidak dilandaskan pada kekuatan pemikiran yang mantap. Usaha lainnya adalah melalui penelitian secara ilmiah : artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²

Namun yang terjadi juga masih terdapat kecenderungan dimana penanggung jawab usaha atau kegiatan mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UPL dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) serta persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus-kasus yang terjadi dimana UPL tidak dioperasikan dan limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan.

² Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas UI (UI-Press), 1986, hal. 2-3

Pihak lain, masyarakat yang dirugikan atas tindakan pencemaran lingkungan, sebagaimana yang terjadi di Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik pada tahun 2005, yang tidak mampu mengajukan sendiri kompensasi, baik kompensasi berupa ganti rugi maupun tindakan perbaikan atau pemulihan lingkungan, karena alasan ketidaktahuan peraturan perundangan yang akan dijadikan pijakan penuntutan dan kedua faktor biaya yang bagi mereka masih menjadi keragu-raguan karena dibayangi akan resiko kalah bila menuntut ke Pengadilan.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan tanpa peduli bagaimana pahitnya hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut artinya peraturan dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Keadilan dalam penegakan hukum lingkungan keadilan harus diperhatikan namun demikian bukan tidak identik keadilan hukum itu sifatnya umum mengikat semua orang.³

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air sungai Brantas oleh pabrik kertas PT. X di Gresik?

³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 134-135.

2. Apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air sungai Brantas oleh pabrik kertas PT. X di Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air sungai Brantas oleh pabrik kertas PT. X di Gresik.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air sungai Brantas oleh pabrik kertas PT, X di Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Pengembangan Pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa pencemaran air.

1.4.2 Manfaat Praktis :

a. Bagi Pabrik

1. Agar tidak ada pencemaran air karena limbah yang ditimbulkan.
2. Agar lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dan juga keseimbangan lingkungan.
3. Agar lebih memikirkan daya gerak perusahaanya supaya terhindar dari sengketa-sengketa Lingkungan Hidup baik antara Perusahaan dengan warga maupun antara perusahaan dengan pemerintah.

b. Bagi Masyarakat

1. Agar terciptanya suatu keseimbangan Lingkungan Hidup.
2. Agar mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak tiap orang mendapat Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

1. Agar lebih mengikuti, memperhatikan dan mengawasi adanya kasus-kasus Lingkungan hidup seperti pencemaran air oleh pabrik kertas
2. Agar dipahami bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup diperlukan adanya kerjasama dan peran dari pemerintah, masyarakat dan juga perusahaan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran menurut pasal 1 butir 12, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi elemen-elemen dari pencemaran adalah :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain dalam lingkungan oleh kegiatan manusia.

2. Kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu.
3. Lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Penentuan kriteria tercemarnya atau telah rusaknya lingkungan adalah menggunakan kriteria ilmiah dan Baku Mutu Lingkungan (BML), lingkungan tercemar adalah:

1. Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalangi mengganggu fungsi dan atau peruntukan dari pada sumber daya atau lingkungan tersebut.

Pencemaran air (sungai), udara dan perusakan hutan merupakan kasus lingkungan yang acapkali dominan dan menonjol. Pencemaran secara garis besar diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran kebudayaan. Sedangkan untuk bahan pencemarannya diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pencemar fisik, pencemar biologis, pencemar kimiawi dan sosial budaya. Jika demikian, cara litigasi (melalui pengadilan) atau non litigasi (melalui luar pengadilan) perlu untuk menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul di lapangan.

Penegakkan hukum Lingkungan berkaitan erat dengan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi

tiga bidang hukum yaitu administratif, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakkan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sarana administratif, keperdataan, kepidanaan.⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai hal mengenai jika terjadi sengketa antara para pihak, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non Litigasi)

Pada prinsipnya upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau
- b. Mengenai tindakan tertentu dalam upaya tidak terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping melibatkan pihak pencemar, masyarakat, pemerintah, juga membuka kemungkinan digunakannya jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini dapat diperoleh, misalnya pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan (pemerintah) maupun yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, misalnya Pusat Studi Lingkungan (P S L),

⁴ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 113

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Gagasan yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sangat menarik, yaitu dengan diperbolehkannya membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas, dan tidak berpihak. Hal ini perlu diantisipasi oleh PSL maupun LSM-LSM sebagai alternatif tambahan kegiatan bagi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam hal menggugat dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:

- a. Orang perorangan atau masyarakat
- b. Instansi pemerintah
- c. Organisasi lingkungan hidup.

Masyarakat sebagai korban akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memiliki hak menggugat, demikian juga instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang bertindak untuk kepentingan masyarakat. Khusus hak menggugat bagi organisasi lingkungan hidup, hak tersebut hanya terbatas pada tuntutan atas hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Cara non litigasi sering dikenal ADR (alternative dispute resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa. Model atau bentuk

yang digunakan dalam ADR cukup beragam, tetapi yang umum atau biasa digunakan adalah : Negosiasi, Mediasi, Arbitrase. Penyelesaian diluar jalur pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan.⁵

a. Model Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri.

b. Model Mediasi

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi, Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak, yang bersifat netral. Pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak

⁵ Muhammad Erwin, *ibid.*, hal. 118

yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Contohnya seperti Penyelesaian sengketa kasus pencemaran air yang dilakukan pabrik Kertas milik Jawa Pos terhadap cabang kali Brantas yang memilih jalur non Litigasi melalui mediasi dengan menunjuk sebuah mediator yang berasal dari lain daerah setempat, yang pada akhirnya tercapai keputusan bersyarat.

c. Model Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari bentuknya di Indonesia dikenal dua macam lembaga arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad. hoc. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen dan melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkat para arbiter.

Proses sengketa non Litigasi umumnya melalui tiga atau fase, yaitu:

- 1) Pra konflik adalah konflik berasal dari munculnya keluhan-keluhan dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlukan

secara tidak wajar, kasar, dilukai hatinya dan lain-lain.

2) Konflik adalah pihak lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, terjadi konfrontasi.

3) Sengketa adalah konflik antar pihak tersebut dibawa dan ditunjukkan ke arena publik (masyarakat) yang kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam instansi penyelesaian sengketa yang berperan maupun yang ditunjuk, maka konflik telah meningkat menjadi sengketa dan konfrontasi antara pihak yang berselisih.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁶

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat melalui aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana :

⁶ Sukanda Husin, SH., LL. M, Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Malang, 2009, Hal. 104-105

a. Aspek hukum perdata

Dalam aspek hukum perdata, pencemar dan/ atau perusak lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 34 UUPH 1997). Pada saat melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu itu.

Penyelesaian sengketa dalam aspek hukum perdata berupa ganti rugi umumnya didasarkan atas:

- 1) Tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 243 KUH Perdata

Jika dalam kegiatan usaha/industri terjadi pencemaran, merusakkan lingkungan maka penyelesaian sengketa secara litigasi dalam aspek hukum perdata adalah harus dipenuhi kewajiban dari perencana usaha/pengusaha sesuai perjanjian yang berupa ganti rugi sesuai dengan maksud dari pasal 243 KUH Perdata.

- 1) Perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal ini terkait dan menjadi ketentuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara litigasi yang dalam aspek hukum

perdata. Kaitannya adalah jika ada suatu perbuatan melanggar hukum/melawan hukum secara perdata penyelesaiannya adalah dengan ganti rugi.

Pada kasus perdata, prinsip yang digunakan pada umumnya adalah proses pembuktian kesalahan dari pencemar dibebankan pada korban pencemaran atau penggugat. Dengan demikian penggugat baru akan memperoleh ganti rugi jika ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pencemar / tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, dengan demikian jika tidak terbukti bersalah, maka tidak ada kewajiban membayar ganti kerugian.

Selanjutnya penjelasan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tanggung jawab mutlak atau strict liability berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Tanggung jawab mutlak ini merupakan "lex specialis" dari perbuatan melanggar hukum pada umumnya, yaitu liability based on fault. Dengan demikian prinsip tanggung jawab mutlak tidak diperlakukan secara umum pada semua kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Tanggung jawab mutlak tidak berlaku jika pencemaran atau perusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan oleh:

- 1) Adanya bencana alam atau peperangan

- 2) Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
- 3) Tindakan pihak ketiga.

2. Aspek Hukum Pidana

Pasal 41 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengisyaratkan bahwa pidana penjara dan denda dapat dikenakan secara bersamaan bagi pencemar dan/ atau perusak lingkungan hidup, baik secara melawan hukum atau sengaja, maupun karena kealpaan. Namun perlu dikemukakan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu jika:

1. Sanksi bidang hukum lain, yakni sanksi administratif, dan sanksi perdata serta upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif/tidak akan efektif.
2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
3. Akibat perbuatannya relatif besar.
4. Perbuatannya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.⁷

Diutamakannya sanksi perdata dibanding dengan sanksi pidana merupakan hal yang wajar karena melihat lebih dulu "akibat" yang ditimbulkan mulai dari ringan sampai paling berat dari suatu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Delik lingkungan yang diatur dalam pasal 41-47 UUPH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Pemberian sanksi tergantung besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan yang berdasar atas :

⁷ Muhammad Erwin, SH., M.Hum, Hukum Lingkungan, PT. Refika Aditama : Bandung, 2009, Hal. 26-27

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. Mengenai tindakan tertentu atas denda dalam upaya tindak pemulihan.

1.5.3. Tinjauan Umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL yaitu singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau usaha, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau usaha layak atau tidak layak lingkungan. Indikator atau tanda bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui :

1. Adanya perubahan suhu air
2. Adanya Perubahan Ph atau konsentrasi ion Hidrogen
3. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air
4. Timbulnya endapan
5. Adanya mikroorganisme
6. Meningkatnya Radio aktif lingkungan⁸

Sebagai sebuah produk hukum yang mengendalikan pembangunan, AMDAL bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya

⁸ Arya Wardhana, Wisnu, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, Hal. 74

2. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
4. Menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
5. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
10. Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan⁹

Sedangkan fungsi dari AMDAL itu sendiri merupakan salah satu upaya pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan yang ditujukan bagi pengambilan keputusan kelayakan lingkungan (perijinan, studi kelayakan, dan perencanaan pengembangan wilayah) bagi perencanaan teknologi dan perancangan proses serta membantu menentukan atau mengidentifikasi aktifitas-aktifitas usaha atau proyek yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.¹⁰

Dari sudut pembangunan nasional masuknya aspek lingkungan dalam konsepsi pembangunan dikenal dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu sebagai warga negara hendaknya melakukan dan menjaga setiap pembangunan lingkungan agar berada dalam prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹¹

⁹ UULH & AMDAL Bab II pasal 3

¹⁰ Muhammad Erwin, op.cit., Hal.87

¹¹ Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan, PT. Alumni, Bandung, 2001, Hal. 31

Konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbale balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan disengaja, untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Suatu proses pembangunan yang berwawasan lingkungan, berasumsi bahwa setiap kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Menurut bahasa perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan merupakan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Selanjutnya Perundang-undangan lain, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, menyatakan bahwa dampak penting merupakan perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih

besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Analisa mengenai dampak lingkungan tersebut mencakup proses ketatalaksanaan atau konsep, sebagai berikut :

1. Penyajian Informasi Lingkungan

Penyajian informasi lingkungan merupakan telaah secara garis besar tentang :

- a. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Rona lingkungan tempat kegiatan
- c. Kemungkinan timbulnya dampak Lingkungan oleh kegiatan tersebut
- d. Rencana Kegiatan pengendalian dampak negatifnya

2. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

KA-ANDAL yaitu suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak – dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

ANDAL yaitu dokumen yang penting berisi telaahan secara cermat yang cukup detail mengenai keadaan lingkungan terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL yaitu dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya - upaya tersebut dirumuskan

berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

Adapun uraian tentang RKL terdiri dari :

- a. Rencana Pengelolaan Lingkungan terdiri dari :
 1. Faktor lingkungan yang terkena dampak
 2. Sumber dampak
 3. Bobot dan tolok ukur dampak
 4. Upaya pengelolaan lingkungan
 - b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 1. Uraian mengenai kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
 2. Rencana kegiatan perlu untuk membentuk unit organisasi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan untuk melaksanakan RKL.
 3. Pembiayaan
 - c. Pengawasan pengelolaan Lingkungan

Uraian mengenai instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi telaksanya RKL.
5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

RPL yaitu dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. RPL merupakan dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.¹²

Konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap Lingkungan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.¹³

¹² Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Grafindo , Jakarta, 1999, Hal.206-207

¹³ Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2007, Hal. 37

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami langsung oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat serta diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Primer dan data Sekunder :

1. Data Primer

Dimana data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni berupa perilaku faktual dari masyarakat melalui penelitian.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat contoh, dokumen hukum, kontrak, putusan hakim dan lain-lain.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya memperjelas bahan hukum Primer contoh, jurnal, hasil-hasil penelitian, media cetak atau elektronik dan lain-lain.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan.¹⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Data Primer

¹⁴ Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, op.cit., hal. 12.

Data ini diperoleh dengan Wawancara, dimana dilakukan percakapan langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak perusahaan dan pihak masyarakat yang bersangkutan. walaupun hanya berupa interaksi biasa, yang jelas utamanya adalah ingin mengetahui kejadian yang ada dengan sebenarnya, seperti Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pencemaran Air yang dilakukan oleh pabrik kertas di Gresik terhadap lingkungan hidup masyarakat sekitarnya.

2. Data Sekunder

- a. Memahami buku-buku yang sesuai dengan penelitian
- b. Mengkaji peraturan yang ada dalam perundang-undangan
- c. Mencatat dan mengutip bahan-bahan hukum dari perpustakaan misal hasil-hasil proposal dan laporan skripsi
- d. Mengidentifikasi dan merumuskan hasil-hasil dari penelitian

1.6.4. Metode Analisis Data

Yaitu bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran secara jelas dan runtut fakta-fakta hukum yang ada dimasyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut pencemaran air dan penyelesaian sengketa non litigasi oleh Perusahaan Kertas PT. X di Gresik.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Kemudian diuraikan mengenai kajian pustaka, dan selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian mengenai tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber data dan bahan hukum, langkah penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, lokasi penelitian, jadwal penelitian, rincian biaya dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa non Litigasi Atas Pencemaran Air Sungai Brantas oleh Pabrik Kertas PT. X di Gresik. Didalamnya berisi mengenai tiga sub bab yang saling berhubungan.

¹⁴ Ali, H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.107

Dimana sub bab pertama berisi gambaran kasus Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Pabrik kertas PT. X karena limbah yang dihasilkan telah mencemari air sungai "cabang kali brantas", yang memberikan kerugian serta menimbulkan kemacetan aktifitas warga setempat. Kemudian sub bab kedua mengenai Penyelesaian Sengketa Pencemaran air Sungai Brantas yang ditimbulkan oleh limbah pabrik Kertas PT. X, tentang bagaimana mengatasi dan cara menangani pencemaran lingkungan tersebut. Dan sub bab ketiga berisi analisa mengenai penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran Lingkungan hidup yang terjadi pada air cabang kali Brantas yang sebagaimana telah benar-benar memenuhi kriteria pencemaran Lingkungan sesuai dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL.

Bab ketiga, akan dibahas mengenai Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa non Litigasi atas Pencemaran Air Sungai Brantas oleh Pabrik Kertas PT. X di Gresik. Dimana terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama menjabarkan tentang Hambatan secara internal. Dan di sub bab kedua memberikan penjelasan mengenai hambatan secara eksternal, dari perusahaan maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang pada akhirnya memilih jalur mediasi sampai keputusan yang brsyarat. Kemudian di sub bab ketiga memberikan penjelasan mengenai analisa factor-faktor yang menonjol baik dari masyarakat maupun pihak pabrik sendiri yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi "mediasi"

Bab Keempat, Berdasar uraian - uraian dalam bab dua dan bab tiga diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan yang mengenai penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air Sungai Brantas oleh imbah pabrik Kertas PT. X, selanjutnya ditarik kesimpulan serta saran yang mendukung keseimbangan lingkungan dan dalam penyelesaian persengketaan lingkungan hidup, sehingga dalam bab keempat sebagai penutup.